

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur berskala besar seperti bendungan memiliki dampak yang kompleks, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Salah satu proyek besar yang menjadi perhatian adalah pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pengendalian banjir, tetapi juga menjadi simbol pembangunan nasional pasca-kemerdekaan Indonesia.¹ Namun, di balik tujuan mulia tersebut, pembangunan bendungan ini menimbulkan konflik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal dan pemerintah.

Di balik keberhasilan pembangunan proyek Bendungan Jenderal Soedirman meninggalkan catatan penting berupa konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Konflik tersebut di picu oleh beberapa faktor, antara lain masalah pembebasan tanah, relokasi penduduk, ganti rugi yang tidak sebanding, serta perubahan sosial-ekonomi yang dialami masyarakat.² Bagi sebagian warga, pembangunan bendungan bendungan berarti kehilangan rumah dan ruang hidup yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Konflik ini semakin kompleks karena melibatkan relasi kekuasaan antara negara, aparat birokrasi, serta masyarakat desa. Pemerintah, dengan legitimasi pembangunan, seringkali mengedepankan pendekatan top-down, sementara masyarakat memiliki keterikatan historis, kultural, dan emosional terhadap tanah mereka. Akibatnya, terjadi resistensi, penolakan, hingga ketegangan sosial yang berlangsung cukup lama.

¹ Dip. HE, Dr. Ir. Isdiana, Ir. D. Pangluar, Ir. CL, Nugroho, Attan Muchtar, ME, Ir. Hari Martadi, Ruhijat Suryadilaga, BE Ir. Ibnu Kasiro, *BENDUNGAN BESAR DI INDONESIA* (Kebayoran Baru, Jakarta, 1995).

² Heni Purnomo, "Kisah Di Balik 2 Bendungan Raksasa Di Banjarnegara, Potret Masa Kolonial Dan Orba," *Liputan6.Com*, November 16, 2021.

Mengangkat sejarah konflik Bendungan Jendral Soedirman menjadi penting karena tidak hanya mencatat peristiwa pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengungkap dinamika sosial politik di tingkat lokal. Konflik tersebut merefleksikan bagaimana proyek pembangunan berskala nasional berinteraksi dengan kepentingan masyarakat desa, serta bagaimana negara Orde baru mengelola perlawanan rakyat. Kajian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman sejarah lokal Banjarnegara, sejarah sosial pembangunan Indonesia, sekaligus memberi pelajaran tentang pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.³

Bendungan ini, yang juga dikenal sebagai Bendungan Mrica, terletak di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dan mulai dibangun pada tahun 1982 dengan tujuan utama untuk membendung aliran Sungai Serayu dan menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek ini dimulai dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh SMEC pada tahun 1974, yang menyatakan bahwa pembangunan bendungan ini layak dilaksanakan. Namun, keputusan untuk melibatkan kontraktor dari Blok Timur, khususnya Technopromexport (TPE) dari Uni Soviet, menimbulkan ketegangan karena sebelumnya banyak proyek pemerintah Indonesia dikerjakan oleh perusahaan dari Blok Barat. Pada akhir tahun 1977, delegasi pemerintah Indonesia melakukan kunjungan ke Moskow untuk membahas kerja sama bilateral terkait proyek ini.⁴

Selama proses pembangunan, proyek ini mengalami berbagai tantangan. Pada tahun 1983, pembangunan sempat terhenti akibat permintaan dari pihak Swedia-Inggris untuk menghentikan proyek meskipun progres sudah mencapai 7,5%.² Negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PLN kemudian berhasil melanjutkan proyek dengan penghematan biaya. Namun,

³ Ibid. Puji Utomo, *Mrica Reservoir Sedimentation: Current Situation and Future Necessary Management*, Journal of the Civil Engineering Forum, vol. 3, 2017.

⁴ Radhi Sinaro, *Menyimak Bendungan Di Indonesia, 1910-2006* (Bentara Adhi Cipta, 2007).

bencana alam seperti banjir pada tahun 1986 menyebabkan kerusakan signifikan dan mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerusakan lebih dari 300 rumah.⁵ Dampak sosial dari pembangunan bendungan ini sangat signifikan. Banyak warga yang terdampak merasa bahwa kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Beberapa warga harus bertransmigrasi ke daerah lain akibat penggusuran tanah mereka untuk pembangunan bendungan. Di sisi lain, warga dari daerah lain justru mendapatkan keuntungan dari proyek ini karena mereka menerima kompensasi tinggi untuk material batu yang digunakan dalam pembangunan. Konflik yang muncul sering kali berkaitan dengan isu penggusuran lahan, kompensasi yang dianggap tidak adil, hingga dampak ekologis yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakat sekitar.⁶ Masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh pembangunan sering kali merasa kehilangan tanah, sumber mata pencaharian, dan identitas budaya yang melekat pada wilayah tersebut. Sementara itu, pihak pemerintah memandang proyek ini sebagai langkah strategis untuk pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks sejarah, konflik semacam ini tidak lepas dari dinamika relasi kekuasaan antara negara dan rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan konflik pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman, termasuk analisis terhadap kebijakan yang diterapkan, respon masyarakat, serta dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Melalui perspektif historis, penelitian ini juga akan mengungkap pola konflik serupa dalam pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru dan Reformasi

Pada pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman, masyarakat di sekitar area proyek mengalami persoalan penggusuran lahan dengan kompensasi yang dianggap tidak memadai. Hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya air setempat juga menyebabkan perubahan pola kehidupan,

⁵ Ibid.

⁶ Heni Purnomo, "Kisah Di Balik 2 Bendungan Raksasa Di Banjarnegara, Potret Masa Kolonial Dan Orba."

yang berdampak pada putusnya mata rantai ekonomi tradisional. Situasi semacam ini bukanlah hal baru dalam sejarah pembangunan Indonesia, terutama pada era Orde Baru, di mana kebijakan pembangunan sering kali kurang melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.⁷

Sebagai salah satu proyek yang dikerjakan dalam masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi, pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman juga merefleksikan pergeseran paradigma dalam tata kelola pembangunan. Konflik yang muncul memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara visi pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi ini menjadi penting untuk dianalisis guna menemukan cara agar kebijakan.

Pembangunan dapat lebih selaras Dalam konteks sejarah, konflik semacam ini tidak lepas dari dinamika relasi kekuasaan antara negara dan rakyatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan konflik pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman, termasuk analisis terhadap kebijakan yang diterapkan, respon masyarakat, serta dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. Melalui perspektif historis, penelitian ini juga akan mengungkap pola konflik serupa dalam pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru dan Reformasi.

Kajian ini menjadi penting karena konflik yang terjadi dalam pembangunan bendungan mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola pembangunan secara inklusif. Dengan memahami sejarah konflik ini, diharapkan dapat memberikan pelajaran untuk perumusan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang. Bendungan ini akhirnya dioperasikan pada tahun 1988 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Maret 1989.⁸

⁷ Ibid.

⁸ M Alwan Rifai, "7 Fakta Unik Waduk Mrica Atau Bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman, Nomor 5 Bikin Kita Bangga Sumber Artikel Berjudul " 7 Fakta Unik Waduk Mrica Atau Bendungan Panglima Besar Jenderal Soedirman, Nomor 5 Bikin Kita Bangga ", Selengkapnya Dengan Link: <https://Banjarnegara.Pikiran-Rakyat.Com/Banjarnegara/Pr-2464736324/7-Fakta-Unik-Waduk-Mrica-Atau-Bendungan-Panglima-Besar-Jenderal-Soedirman-Nomor-5-Bikin-Kita-Bangga,>" Tim Banjarnegaraku, June 14, 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Profil Bendungan Jendral Soedirman?
2. Bagaimana konflik dan penyelesaian konflik Pembangunan Bendungan Jendral soedirman?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui profile Bendungan jendral soedirman.
2. Untuk mengetahui konflik dan penyelesaian konflik Pembangunan Bendungan Jendral Soedirman.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi tambahan bagi para pembaca mengenai sejarah konflik pembangunan bendungan Jendral Soedirman di Banjarnegara tahun 1979-1987.
2. Sebagai sumber karya ilmiah bagi peneliti dalam memperkaya khasanah penulisan sejarah dalam bidang sejarah Bendungan di Indonesia
3. Sebagai sumber literatur bagi pembaca dalam upaya sadar mengenai kajian masa lampau yang berkenaan dengan sejarah di Banjarnegara

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah tinjauan terhadap literatur untuk mengetahui penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa. Dalam kajian ini, kita dapat mempelajari langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan menganalisis hasil penelitian mereka. Dengan begitu, kajian pustaka memberikan gambaran mengenai metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya serta temuan-temuan yang telah dicapai. Berikut tulisan-tulisan yang memuat tentang sejarah maupun Bendungan Jendral Soedirman :

Pertama, Buku yang berjudul **Menyimak bendungan di**

Indonesia 1910-2006 yang di tulis oleh Radhi Shinaro, Buku ini menjelaskan tentang Buku ini, yang diterbitkan pada 2007 oleh Bentara Adhi Cipta sebagai bagian dari Seri Sejarah Konstruksi Indonesia, merupakan kajian komprehensif tentang evolusi pembangunan bendungan di Indonesia sepanjang periode 1910 hingga 2006. Radhi Sinaro (bersama kontributor seperti A. Hanan Akhmad) menyusun narasi historis yang menelusuri transisi dari era kolonial Belanda di mana bendungan awal dibangun untuk irigasi perkebunan menuju proyek-proyek nasional pasca-kemerdekaan, termasuk pada masa Orde Baru yang menekankan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pengendalian banjir. Buku ini membahas lebih dari 100 bendungan utama, seperti Waduk Jatiluhur, Brantas, dan Mrica, dengan fokus pada aspek teknis (desain, material, dan tantangan geoteknik), konteks sosial-ekonomi, serta peran lembaga seperti Perum Jasa Tirta dalam pengelolaan sumber daya air. Tema utamanya adalah bagaimana bendungan menjadi instrumen pembangunan nasional, meskipun sering kali disertai isu sedimentasi, relokasi masyarakat, dan adaptasi terhadap bencana alam. Buku ini kaya akan ilustrasi, peta, dan data arsip, menjadikannya referensi primer untuk studi sejarah infrastruktur air di Indonesia.

Persamaan, membahas sejarah pembangunan bendungan di Indonesia secara kronologis, Menyentuh aspek teknis konstruksi, dampak sosial-ekonomi, dan konflik yang muncul akibat proyek bendungan, Bendungan Mrica (dibangun 1978–1989) termasuk dalam rentang waktu yang dicakup buku (hingga 2006), sehingga menjadi salah satu kasus yang kemungkinan besar dibahas atau bisa dijadikan perbandingan. Keduanya menyoroti ketegangan antara manfaat infrastruktur (listrik, irigasi) dengan kerugian masyarakat lokal dan masalah lingkungan (seperti sedimentasi dan penggusuran)

Perbedaan. Buku Radhi Sinaro bersifat luas dan umum. Ia merekam sejarah lebih dari satu abad pembangunan bendungan di seluruh

Indonesia, mulai dari masa kolonial Belanda hingga tahun 2006, dengan fokus pada aspek teknis rekayasa sipil, kronologi proyek, dan perkembangan teknologi bendungan secara nasional. Isinya lebih deskriptif dan referensiklopedia, jarang mendalami konflik sosial atau politik di satu lokasi secara mendalam.

Kedua, Buku yang berjudul **Bendungan Besar di Indonesia** yang diterbitkan pada Juni 1995 oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum, merupakan kompilasi data teknis tentang 82 bendungan besar di Indonesia, baik yang sudah beroperasi maupun sedang dibangun. Buku ini mencakup sejarah pembangunan bendungan sejak era kolonial Belanda hingga 1995, dengan fokus pada rekayasa sipil, pengelolaan sumber daya air, pemeliharaan, dan pengamanan. Setiap bendungan disajikan dengan detail seperti data teknis (misalnya, lokasi, dimensi, kapasitas), foto, gambar penting, dan informasi kondisi.⁹ Buku ini disusun berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) di berbagai daerah, seperti Citarum, Cimanuk, Serayu-Bogowonto (termasuk Bendungan Mrica), Bengawan Solo, Brantas, dan lainnya di pulau-pulau seperti Jawa, Sumatera, dan Madura. Tujuannya sebagai referensi bagi pengelola pengairan, proyek infrastruktur, dan profesional terkait untuk mendukung pengembangan bidang pengairan dan rekayasa bendungan. Meski informasinya masih terbatas dan diakui ada kekurangan, buku ini menekankan manfaat bendungan sebagai sumber air buatan yang vital bagi irigasi, pencegahan banjir, pembangkit listrik, dan ekonomi masyarakat.

Persamaan, Keduanya membahas Bendungan Mrica secara langsung — buku ini mencatat Mrica secara resmi (hal. 62–65) sebagai salah satu bendungan besar nasional, lengkap dengan data teknis, foto, dan kronologi pembangunan 1978–1989. Buku ini mewakili narasi resmi pemerintah Orde Baru tentang keberhasilan proyek bendungan, sedangkan

⁹ Ir. Ibnu kasiro, *BENDUNGAN BESAR DI INDONESIA*.

skripsi Saya justru mengungkap sisi gelap dari proyek yang sama: penggusuran paksa ribuan warga, perlawanan masyarakat, trauma sosial, dan krisis sedimentasi hingga kini.

Perbedaan, Isinya murni teknis dan celebratory: data ukuran, kapasitas, foto-foto megah bendungan, tahun peresmian, dan narasi “keberhasilan pembangunan nasional”. Tidak ada satu kalimat pun tentang penggusuran ribuan warga, penembakan demonstran, trauma pengungsian, ganti rugi yang tidak layak, apalagi krisis sedimentasi yang sudah mulai terlihat. Skripsi Saya justru kebalikannya, fokus pada sisi yang disembunyikan buku itu sejarah kekerasan negara, perlawanan masyarakat desa-desa di Banjarnegara, politik pembebasan tanah ala Orde Baru, serta dampak jangka panjang berupa waduk yang kini nyaris penuh lumpur

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan kajian yang dibahas, dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menentukan data yang benar dan tepat. Dalam penelitian sejarah terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Heuristik merupakan tahapan awal dari metode penelitian sejarah yang mana pada tahapan ini penulis harus mengumpulkan sumber sejarah untuk diteliti lebih lanjut, yakni sumber-sumber tersebut bisa didapatkan berupa temuan seperti dokumen, buku, koran, rekaman, bahkan benda maupun sumber lisan yang sejaman dengan apa yang akan diteliti.¹⁰

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama dalam penelitian sejarah. Heuristik adalah pencarian dan pengumpulan sumber yang sesuai dengan

¹⁰ Sulasman, *METODE PENELITIAN SEJARAH*, ed. ed. by Beni Ahmad Saeban (Bandung: 1st edn (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2014).

tema penelitian. Sepertiyang sudah diketahui, pembagian sumber terdiri dari sumber primer dan sumbersekunder. Diantara sumber yang penulis dapatkan untuk menunjang penelitian diantaranya :

a. Dokumen/ Arsip

Arsip surat :

- 1) SURAT KEPUTUSAN PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH MPD. 026 /SAK/83. Pada Tanggal : Semarang, 30 April 1983 kepada : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal Rekomendasi Pembebasan Tanah di Kecamatan Punggelan.
- 2) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Tanggal 28 Oktober 1982 No. 593.8/490/1982. Kepada PULN PROYEK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH. TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN MERALAT IJIN PEMBEBASAN TANAH KEPADA PIMPINAN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO, PLN. JAWA TENGAH, GUNA PEMBANGUNAN PROYEK PLTA. MRICA DAN PLTA MAUNG DI KABUPATEN DAERAH TK. II BANJARNEGARA.
- 3) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO. MPD. 012 /SAK/85.Semarang , 13 maret 1985. Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal sidang pembebasan tanah kurang lebih 10 Ha. Di desa Wanadadi dan Karangjambe Kec.Wanadadi.
- 4) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 001 /SAK/85.Semarang 12 januari 1985 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal sidang pembebasan tanah kurang lebih 0,75 Ha. Di desa Bawang kec. Bawang.

- 5) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 001/SAK/85.Semarang 12 januari 1985 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal sidang pembebasan tanah kurang lebih 0,75 Ha. Di desa Bawang kec. Bawang.
- 6) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/3390/MPD. 27 November 1985. Kepada Pemimpin Proyek induk pembangkit hidro jawa Tengah perihal Pembebasan tanah sehubungan dengan permendagri no. 2 tahun 1985
- 7) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/748. 24 Juli 1985 Kepada Camat Bawang dan Camat Wanadadi perihal Penyelesaian Ganti rugi tanah yang di gunakan Proyek PLTA Mrica.
- 8) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 592.2/6052 31 Juli 1985. Kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Tengah perihal Kunjungan Kerja Team BPK.
- 9) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 083/SAK/84 3 Desember 1984. kepada BUPATI KEPALA TINGKAT II BANJARNEGARA perihal Sidang pembebasan tanah + 0,75 ha. Di Desa Bawang Kec. Bawang.
- 10) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 143/00573, 7 Januari 1985. Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal Mohon petunjuk pengelolaan kekayaan bondo desa bagi desa yang tergenang PLTA Mrica

- 11) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 083/SAK/84, 3 Desember 1984. Kepada BUPATI KEPALA TINGKAT II BANJARNEGARA perihal Sidang pembebasan tanah + 0,75 ha. Di Desa Bawang Kec. Bawang
- 12) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 004/SAK/85, 5 Februari 1985. Kepada BUPATI KEPALA TINGKAT II BANJARNEGARA perihal Pembebasan tanah daerah Sinila sebagai pengganti tanah perum perhutani Jateng yang di pakai untuk Proyek PLTA Maung.
- 13) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/4178, 17 Oktober 1989. Kepada Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perihal Penyelesaian Ganti rugi tanah proyek PLTA Mrica Banjarnegara
- 14) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/1655, 2 Desember 1986. Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Pemindahan rumah sdr. Warsono cs, penduduk Dukuh lumbir Desa Tapen Kecamatan Wanadadi
- 15) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/783, 8 Desember 1986. Kepada 1. Yth, KOMANDAN KOMANDO RESOR MILITER 071/ WIJAYAKUSUMA, Yth. KEPALA KEPOLISIAN BANYUMAS, Yth. KOORDINATOR KEJAKSAAN NEGERI WILAYAH BANYUMAS, Yth. PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO perihal Ucapan terimakasih

b. Media online

- 1) Rifai, M. Alwan. “7 fakta unik waduk mrca atau bendungan jendral sudirman, nomor 5 bikin bangga – Banjarnegaraku” banjarnegara.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2022-10-28
- 2) <https://www.liputan6.com/regional/read/4711766/kisah-di-balik-2-bendungan-raksasa-di-banjarnegara-potret-masa-kolonial-dan-orba>

c. Buku

- 1) Buku yang berjudul menyimak bendungan di Indonesia karya Radhi Sinaro, dkk. Tangerang Selatan : Bentara Adhi Cipta. ISBN 978-979- 3945-23-1
- 2) Bendungan Besar Di Indonesia oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, 1995

d. Vidio dokumenter

- 1) Catur Budijantoro. Film dokumenter yang berjudul ‘Asa Tenggelam di Tanah kelahiran’

2. Kritik

Langkah selanjutnya adalah tahapan kritik. Kritik merupakan tahapan verifikasi terhadap sumber sumber yang telah diperoleh pada tahap heuristik. Kritik terhadap sumber terbagi menjadi dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik merupakan tahap lanjutan setelah tahapan heuristik, pada tahapan ini, kritik dibagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal merupakan seleksi aspek-aspek luar terhadap sumber, setelah kritik ekstrenal adapun kritik internal yang menyeleksi bagian aspek aspek isi yang ada didalam sumbernya.¹¹

Kritik ekstern merupakan kritik yang menguji keabsahan sumber dari fisiknya yang apabila sumber tulisan maka dilihat dari kapan sumber

¹¹ Ibid.

itu dibuat, materi sumber, siapa pengarangnya, dimana sumber itu dibuat, apakah sumber itu asli atau turunan dan apakah sumber itu utuh atau tidak tulisannya. Adapun jika sumbernya merupakan sumber lisan maka dilihat dari siapa yang diwawancara, umur, ingatan, dan jawabannya.

Kritik intern merupakan kritik yang bertujuan untuk menguji keabsahan isi sumber. Kritik ini menelaah isi dari sumber yang didapat baik lisan maupun tulisan. Dalam tahap kritik diperlukan beberapa sumber sebagai pembanding dalam komparasi dan koraborasi.

a. Kritik Eksternal

- 1) SURAT KEPUTUSAN PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH MPD. 026 /SAK/83. Pada Tanggal : Semarang, 30 April 1983 kepada : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal Rekomendasi Pembebasan Tanah di Kecamatan Punggelan. Surat ini berisi 2 lembar Dilihat dari kondisi fisiknya masih dalam keadaan yang baik, tulisannya masih sangat jelas. Dilihat dari langsung secara fisiknya surat ini masih sangat layak untuk dijadikan sumber utama dalam penelitian ini
- 2) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Tanggal 28 Oktober 1982 No. 593.8/490/1982. Kepada PULN PROYEK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH. TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN MERALAT IJIN PEMBEBASAN TANAH KEPADA PIMPINAN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO, PLN. JAWA TENGAH, GUNA PEMBANGUNAN PROYEK PLTA. MRICA DAN PLTA MAUNG DI KABUPATEN DAERAH TK. II BANJARNEGARA. berbentuk surat dan mempunyai 2 Halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga masih dapat di baca. ini

menandakan bahwasannya, surat ini dapat dijadikan rujukan untuk penulis.

- 3) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO. MPD. 012/SAK/85. Semarang , 13 maret 1985. Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal sidang pembebasan tanah kurang lebih 10 Ha. Di desa Wanadadi dan Karangjambe Kec.Wanadadi. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan rujukan untuk penulis.
- 4) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 001 /SAK/85. Semarang 12 januari 1985 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal sidang pembebasan tanah kurang lebih 0,75 Ha. Di desa Bawang kec. Bawang. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.
- 5) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 083 /SAK/ 84.Semarang, 3 desember 1984. Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal pembebasan tanah kurang lebih 0,75 Ha. Di desa Bawang kec. Bawang. Berbentuk surat terdiri dari 2 halaman. Di lihat dari kelayakan kertasnya agak kurang di karenakan tulisannya sudah tidak terlalu jelas.
- 6) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/3390/

MPD. 27 November 1985. Kepada Pemimpin Proyek induk pembangkit hidro Jawa Tengah perihal Pembebasan tanah sehubungan dengan permendagri no. 2 tahun 1985. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.

7) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/748.

24 Juli 1985 Kepada Camat Bawang dan Camat Wanadadi perihal Penyelesaian Ganti rugi tanah yang di gunakan Proyek PLTA Mrica. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.

8) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 592.2/6052

31 Juli 1985. Kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Tengah perihal Kunjungan Kerja Team BPK. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.

9) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD.

083/SAK/84 3 Desember 1984. kepada BUPATI KEPALA TINGKAT II BANJARNEGARA perihal Sidang pembebasan tanah + 0,75 ha. Di Desa Bawang Kec. Bawang. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas

sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.

- 10) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 143/00573, 7 Januari 1985. Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal Mohon petunjuk pengelolaan kekayaan bondo desa bagi desa yang tergenang PLTA Mrica. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.
- 11) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 083/SAK/84, 3 Desember 1984. Kepada BUPATI KEPALA TINGKAT II BANJARNEGARA perihal Sidang pembebasan tanah + 0,75 ha. Di Desa Bawang Kec. Bawang. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.
- 12) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 004/SAK/85, 5 Februari 1985. Kepada BUPATI KEPALA TINGKAT II BANJARNEGARA perihal Pembebasan tanah daerah Sinila sebagai pengganti tanah perum perhutani Jateng yang di pakai untuk Proyek PLTA Maung. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.

- 13) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/4178, 17 Oktober 1989. Kepada Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perihal Penyelesaian Ganti rugi tanah proyek PLTA Mrica Banjarnegara. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.
- 14) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/1655, 2 Desember 1986. Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Pemindahan rumah sdr. Warsono cs, penduduk Dukuh lumbir Desa Tapen Kecamatan Wanadadi. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.
- 15) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/783, 8 Desember 1986. Kepada 1. Yth, KOMANDAN KOMANDO RESOR MILITER 071/ WIJAYAKUSUMA, Yth. KEPALA KEPOLISIAN BANYUMAS, Yth. KOORDINATOR KEJAKSAAN NEGERI WILAYAH BANYUMAS, Yth. PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO perihal Ucapan terimakasih. berbentuk surat dan mempunyai 1 halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber sekunder untuk penulis.

b. Kritik Internal

- 1) SURAT KEPUTUSAN PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH MPD. 026 /SAK/83. Pada Tanggal :Semarang, 30 April 1983 kepada :Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal Rekomendasi Pembebasan Tanah di Kecamatan Punggelan. Surat ini berisi 2 lembar Dilihat dari kondisi fisiknya masih dalam keadaan yang baik, tulisannya masih sangat jelas. Surat ini berisi tentang perintah Presiden Soeharto kepada Bupati Banjarnegara untuk membeli tanah di daerah punggelan karena di nilai bebatuan disana cocok untuk pembangunan bendungan. Dilihat dari langsung secara fisiknya surat ini masih sangat layak untuk dijadikan sumber utama dalam penelitian ini.
- 2) SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Tanggal 28 Oktober 1982 No. 593.8/490/1982. Kepada PULN PROYEK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH. TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN MERALAT IJIN PEMBEBASAN TANAH KEPADA PIMPINAN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO, PLN. JAWA TENGAH,GUNA PEMBANGUNA12N PROYEK PLTA. MRICA DAN PLTA MAUNG DI KABUPATEN DAERAH TK. II BANJARNEGARA. berbentuk surat dan mempunyai 2 Halaman. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas, surat ini berisikan perintah Presiden Soeharto keapada Gubernur Jawa Tengah untuk menandatangani surat pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan. surat ini masih dapat di baca. menandakan bahwasannya, surat ini dapat dijadikan rujukan untuk penulis.

- 3) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO. MPD. 012 /SAK/85. Semarang , 13 maret 1985. Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal sidang pembebasan tanah kurang lebih 10 Ha. Di desa Wanadadi dan Karangjambe Kec.Wanadadi. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Surat ini berisikan perintah Presiden Soeharto kepada Bupati Banjarnegara untuk membeli dan membebaskan tanah di daerah kecamatan Wanadadi khususnya desa Karangjambe karena nantinya wilayah tersebut akan di genangi air bendungan. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan rujukan untuk penulis.
- 4) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 001/SAK/85. Semarang 12 januari 1985 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal sidang pembebasan tanah kurang lebih 0,75 Ha. Di desa Bawang kec. Bawang. berbentuk surat dan mempunyai 2 halaman. Surat ini berisikan perintah Presiden Soeharto kepada Bupati Banjarnegara untuk membeli dan membebaskan tanah di daerah kecamatan bawang karena masyarakat desa Bawang protes terkait ganti rugi yang di berikan tidak setimpal. Dilihat dari kondisinya masih dalam keadaan baik, tulisannya masih jelas sehingga dapat dibaca. Hal ini menjadi landasan kuat surat ini dapat dijadikan sumber primer untuk penulis.
- 5) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 083 /SAK/ 84.Semarang, 3 desember 1984. Kepada Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal pembebasan tanah kurang lebih 0,75 Ha. Di desa Bawang kec. Bawang. Berbentuk surat terdiri dari 2 halaman. Surat ini berisikan perintah Presiden Soeharto kepada Bupati Banjarnegara untuk membeli dan membebaskan tanah di daerah kecamatan Bawang, ini adalah surat pertama sebelum surat perintah kedua turun karena masyarakat tapen menolak untuk migrasi di sebabkan ganti rugi yang di berikan tidak setimpal Di lihat dari kelayakan kertasnya agak kurang di karenakan tulisannya sudah tidak terlalu jelas.

- 6) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO gkt. 27 November 1985. Kepada Pemimpin Proyek induk pembangkit hidro jawa Tengah perihal Pembebasan tanah sehubungan dengan permendagri no. 2 tahun 1985. Ssurat ini berisikan tentang mengatur tata cara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan di wilayah Kecamatan. Di lihat dari kelayakan surat ini tulisannya terlihat jelas sehingga bisa di gunakan sebagai sumber primer
- 7) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 593.8/748. 24 Juli 1985 Kepada Camat Bawang dan Camat Wanadadi perihal Penyelesaian Ganti rugi tanah yang di gunakan Proyek PLTA Mrica. Surat ini berisikan tentang peninjauan harga tanah lebih tinggi tidak dapat di laksanakan, penawaran di anjurkan di ambil sekarang, dan tidak menyerahkan pengurusannya kedapa orang lain' di lihat dari kelayakan kertas masih bagus tetapi untuk tulisaanya kurang jelas tetapi masih bisa untuk di baca sehingga penulis menggunakannya sebagai sumber primer.

- 8) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO MPD. 083/SAK/84, 3 Desember 1984. Kepada BUPATI KEPALA TINGKAT II BANJARNEGARA perihal Sidang pembebasan tanah + 0,75 ha. Di Desa Bawang Kec. Bawang. Surat ini berisikan tentang di bangunnya canal Mrica dan Jalan kerja PLTA Mrica di daerah Desa Bawang, Kecamatan Bawang, ternyata ada lokasi tanah yang perlu di bebaskan, karena lokasi akan tergenang air/banjir dan sebagian akan terkena urugan tanah sebagai akibat pembuatan jalan dan tanggul canal Mrica, terdapat 13 Kepala Keluarga dengan luas tanah keseluruhan mencapai 7.225 m². Kemudian berisikan juga tentang salah satu data untuk dasar pemberian ganti rugi kepada para pemilik tanah, maka dalam waktu dekat akan di adakan pengukuran dan inventarisasi tanah, tanaman, dan bangunan yang ada di atas tanah termaksud butir 1 di atas, kemudian agar tidak terjadi keresahan pada masyarakat pemilik tanah yang tanahnya akan di bebaskan di Desa Bawang, maka kami mohon bantuan saudara untuk memberikan penjelasan/penyuluhan kepada mereka. Di lihat dari kelayakan surat ini sangat layak di karenakan kertas dan tulisannya masih sangat jelas dan bisa di baca, maka dari itu penulis menjadikannya sumber primer.
- 9) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 592.2/6052 31 Juli 1985. Kepada Kepala Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Tengah perihal Kunjungan Kerja Team BPK. Surat ini berisikan maksud kunjungan kunjungan team BPK dalam rangka pemeriksaan mengenai pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah yang terkena Proyek PLTA Mrica, adapun hal yang di tanyakan berupa masalah

kewenangan pembayaran ganti rugi, masalah gugatan badakarya telah selesai, masalah pembayaran ganti rugi tanah yang belum di terima, masalah honorer, masalah pemberangkatan transmigrasi dan yang belum di berangkatkan. Kemudian pada jam 11.00 WIB team BPK melanjutkan bertatap muka langsung kepada SEKWILDA, Pembantu Bupati, Camat, dan Kepala Desa yang terkena dalam masalah pembebasan ganti rugi, adapun titik pembicaraanya terkait tanah yang di bebaskan dan bagaimana pelaksanaan ganti rugi, potongan uang yang untuk pembangunan desa yang telah di setuju LKMD dan LMD, dan masalah transmigrasi yang berjumlah 2.245 Kepala Keluarga atau 8.760 jiwa, dan ganti rugi yang belum di ambil sebesar Rp.377.433.508. di lihat dari kelayakn kertas masih bagus tapi untuk tulisannya kurang jelas tetapi bisa di baca, maka dari itu penulis menjadikannya sumber primer.

- 10) SURAT KEPUTUSAN DARI PULN PROYEK INDUK PEMBANGKIT HIDRO JAWA TENGAH NO 143/00573, 7 Januari 1985. Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara perihal Mohon petunjuk pengelolaan kekayaan bondo desa bagi desa yang tergenang PLTA Mrica. Surat ini berisikan pemberitahuan bahwa untuk pengelolaan kekayaan bondo desa yang meliputi mengadakan inventarisasi semua kekayaan desa wilayahnya terkena genangan air PLTA Mrica beserta perkiraan ganti rugi yang perlu di mintakan kepada pimpinan proyek PLTA Mrica, dengan uang ganti rugi di maksud segera mengadakan pentaan kembali desa yang masih tersisa untuk di gabung atau di satukan ke dalam desa lain yang masih memenuhi persyaratan, agar terwujud adanya pemerintahan yang mantap, dalam rangka pentaan

kembali sebagaimana di maksud, perlu di perhatikan beberapa faktor seperti tersebut Bab II pasal 3 huruf a a/d g permendagri No.4 tahun 1981, adapun kekayaan bondo desa yang di mulanya dari hasil swadaya gotong royong masyarakat desa apabila desa yang bersangkutan di hapus, maka pengelolaan kekayaan bondo desanya menjadi wewenang Pemda tingkat II. Di lihat dari kelayakan kertas dan tulisannya masih bagus dan bisa di baca maka dari itu penulis menjadikannya sebagai sumber primer.

3. Interpretasi

Setelah fakta fakta disusun, kemudian dilakukan tahapan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran bersifat individual sehingga seringkali menjadi subjektif. Dalam tulisan kali ini, Interpretasi merupakan tahapan penafsiran fakta yang telah didapatkan dari tahapan sebelumnya yaitu kritik, yang mana telah melewati kritik eksternal dan kritik internal.¹² Penulis menggunakan teori konflik yang di kemukakan Ralf Dahrendorf.

Dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman dapat dipahami sebagai sebuah proses sosial yang memunculkan pertentangan antara kelompok yang memegang otoritas dan kelompok yang berada pada posisi subordinat. Dahrendorf menegaskan bahwa setiap struktur sosial selalu memiliki dua kelompok utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan (*authority*) dan mereka yang berada dalam posisi menerima keputusan (*subordinate*).¹³ Ketimpangan relasi inilah yang menjadi sumber utama munculnya konflik. Dalam konteks pembangunan bendungan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi terkait seperti PLN bertindak sebagai kelompok otoritatif yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, penetapan lokasi, hingga pembebasan lahan. Sebaliknya, masyarakat

¹² Ibid.

¹³ Aniek Rahmaniah, *RALF DAHRENDORF*, n.d.

Desa Bawang, Sipren, dan desa terdampak lainnya berada pada posisi subordinat yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang telah ditetapkan dari atas (top-down).

Ketidakseimbangan kekuasaan tersebut tercermin dalam sejumlah arsip dan dokumen resmi seperti Surat MPD.001/SAK/85 tentang pembebasan 0,75 hektare lahan, Surat Nomor 592.2/6052 terkait kunjungan tim BPK, hingga Surat Nomor 593.8/3390 yang menginstruksikan proses pembebasan lahan sesuai Permendagri No. 2 Tahun 1985. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bagaimana negara mengoperasikan kekuasaan administratif secara formal, namun sering kali tidak disertai dengan komunikasi yang memadai kepada masyarakat. Situasi ini menciptakan jarak antara prosedur legal yang disusun oleh pemerintah dengan pengalaman subjektif warga yang merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam kacamata Dahrendorf, kondisi seperti ini merupakan bentuk manifestasi dominasi struktural yang berpotensi melahirkan resistensi sosial.¹⁴

Konflik kemudian muncul karena warga tidak hanya mempertanyakan nilai ganti rugi, tetapi juga legitimasi proses yang mereka anggap tidak transparan. Ketidakpuasan warga terhadap pendataan lahan, ketidakjelasan status tanah penggarap, hingga perbedaan persepsi mengenai hak atas tanah menjadi bagian dari “kepentingan laten” yang berubah menjadi konflik terbuka (manifest conflict) ketika proses pembebasan lahan mulai dijalankan secara intensif. Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik selalu muncul ketika suatu kelompok merasa keputusan yang diambil oleh kelompok berkuasa mengancam kepentingan mereka. Kasus pembebasan lahan Bendungan Jenderal Soedirman menunjukkan pola persis seperti itu: keputusan pembangunan yang dianggap sudah final bertabrakan dengan realitas

¹⁴ M Wahid and Nur Tualeka, “TEORI KONFLIK SOSIOLOGI KLASIK DAN MODERN,” *JURNAL AL HIKMAH*, January 2017, 17.

sosial lokal yang dinamis dan penuh keterikatan emosional terhadap tanah.

Lebih jauh, teori Dahrendorf membantu menjelaskan mengapa konflik tersebut tidak mereda meskipun pemerintah telah menunjukkan legitimasi formal melalui surat-surat keputusan dan instrumen hukum lainnya. Menurut Dahrendorf, konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan legal-administratif, karena akar konfliknya terletak pada ketimpangan struktur kekuasaan. Oleh sebab itu, selama masyarakat belum diberikan ruang partisipasi yang sejajar, dan selama proses negosiasi masih mengedepankan pendekatan koersif-halal administratif daripada dialogis, konflik akan terus muncul dalam berbagai bentuk, baik sebagai protes, penolakan, maupun ketegangan sosial yang berkepanjangan.¹⁵

Dalam konteks historis pembangunan bendungan, teori Dahrendorf memungkinkan kita memahami bahwa konflik bukanlah akibat anomali atau kesalahpahaman semata, tetapi bagian dari dinamika struktural antara negara sebagai pemegang otoritas pembangunan dan masyarakat lokal yang mempertahankan hak-hak komunal mereka. Dengan demikian, konflik pembangunan Bendungan Jenderal Soedirman bukan hanya problem teknis pembebasan lahan, tetapi merefleksikan pertarungan antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat yang memiliki pengalaman, sejarah, dan pandangan berbeda tentang tanah serta ruang hidup mereka.

4. Historiografi

Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif pada masa lampau yang diperoleh dengan menempuh proses atau tahapan metode penelitian sejarah.¹⁶ Tahapan heuristik ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah dimana semua data yang telah dikumpulkan dari tahap pertama dituliskan dalam tulisan yang sistematis dan mudah dipahami.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sulasman, *METODE PENELITIAN SEJARAH*.

Dalam tulisan kali ini, penulis akan menuliskan dengan sistem sebagai berikut:

BAB I: bagian ini adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang sebagai pengantar pembahasan, rumusan masalah sebagai pokok dan batasan dari bahasan yang akan dibahas, tujuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, kajian pustaka dan metode penelitian yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

BAB II : bagian pembahasan, pada bagian ini penulis menguraikan profil bendungan Jendral Soedirman, diawali dengan sejarah pembangunan bendungan Jendral Soedirman yang hampir gagal karena tidak ada investor hingga peresmian bendungan yang dilakukan oleh presiden Soeharto

BAB III : pada bagian ini penulis memaparkan polemik dan konflik yang terjadi pada saat pembangunan bendungan Jendral Soedirman antara masyarakat yang terkena dampak pembangunan dengan pemerintah hingga penyelesaian polemik dan konflik yang terjadi.

BAB IV: bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Dalam bagian ini pula penulis akan menuliskan sumber sumber serta lampiran lampiran yang berkaitan dengan pembahasan